



KELEMBAGAAN PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KPH RINJANI TIMUR

RIZKI SUKARMAN S



PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH Rinjani Timur” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 31 Juli 2025

Rizki Sukarman S
E1501221003

RINGKASAN

RIZKI SUKARMAN S. Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH Rinjani Timur. Dibimbing oleh IIN ICHWANDI dan BRAMASTO NUGROHO.

Kawasan KPH Rinjani Timur di NTB tengah menghadapi kerusakan dan degradasi hutan yang serius, terutama disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi area pertanian serta aktivitas penebangan liar (*illegal logging*). Pemerintah melaksanakan RHL guna memulihkan fungsi dan kondisi ekosistem hutan. Namun, implementasinya dihadapkan berbagai hambatan kelembagaan. Kelembagaan memainkan peran sebagai kerangka yang mengatur hubungan antaraktor, pembagian peran, serta mekanisme pengambilan keputusan di tingkat tapak. Konsep kelembagaan tidak hanya mencakup struktur formal seperti instansi pemerintah, tetapi juga mencakup aturan main, norma sosial, dan praktik-praktik lokal. Keberhasilan RHL sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga yang efektif, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antarlembaga di tingkat lokal), serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik fisik; (2) menganalisis struktur kelembagaan; (3) mengkaji perilaku aktor; dan (4) mengevaluasi kinerja kelembagaan RHL.

Penelitian ini difokuskan pada dua desa pelaksana RHL tahun 2021, yakni Desa Gunung Malang dan Desa Padak Guar. Pelaksanaan RHL dilakukan melalui dua skema yaitu swakelola seluas 25 ha di Desa Gunung Malang dan kontraktual oleh CV. SZ mencakup masing-masing 50 ha di Desa Gunung Malang dan Desa Padak Guar. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis SSPK (Struktur Kelembagaan, Karakteristik Sumber Daya, Perilaku Aktor, dan Kinerja Kelembagaan) sebagaimana dikembangkan oleh Nugroho (2016). Dalam kerangka ini, kinerja kelembagaan ditentukan oleh tiga komponen utama yang saling memengaruhi, yaitu struktur kelembagaan, karakteristik sumber daya, dan perilaku aktor. Ketiganya membentuk dinamika kelembagaan yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program RHL.

Temuan pertama berkaitan dengan karakteristik sumber daya. Area RHL memiliki karakteristik lahan kering, berbatu, dengan akses air yang terbatas. Kawasan ini terdapat aktivitas masyarakat dan dikelola dengan pendekatan agroforestri. Sementara dari sisi karakteristik penyediaan dan konsumsinya, area RHL dikategorikan sebagai *common pool resources* (CPRs) atau sumber daya bersama. CPRs memiliki dua ciri utama, yakni *non-excludable* (sulit untuk mengecualikan pihak lain dalam mengakses sumber daya) dan *subtractable* (pemanfaatan oleh satu pihak mengurangi ketersediaan bagi pihak lain). Karakteristik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan, karena memerlukan mekanisme kelembagaan yang mampu mengatur akses, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya secara kolektif dan berkelanjutan.

Kedua, struktur kelembagaan terdiri atas dua bentuk utama: kelembagaan formal dan kelembagaan informal. Kelembagaan formal mencakup regulasi, prosedur operasional standar (SOP). Sementara itu, kelembagaan informal merujuk pada norma-norma sosial, nilai, dan praktik lokal yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan efektivitas antara dua skema



pelaksanaan RHL. Skema swakelola yang dilaksanakan oleh KPH Rinjani Timur menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan skema kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. SZ. Perbedaan ini terutama tampak dalam aspek pengawasan lapangan dan tingkat pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi.

Sintesis dari temuan terkait struktur kelembagaan menunjukkan beberapa hal penting: (1) Terdapat ketidakjelasan beberapa posisi dan kewenangan yang mengakibatkan tumpang tindih peran yang perlu didefinisikan; (2) Nilai-nilai integritas seperti kejujuran perlu ditanamkan dan ditegakkan berdasarkan aturan main; (3) Target capaian minimal 75% tidak seharusnya hanya dijadikan indikator administratif, tetapi harus mencerminkan kualitas capaian secara substantif; (4) Minimnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan RHL menjadi kendala serius dalam mendorong partisipasi dan akuntabilitas; dan (5) Diperlukan komitmen bersama dan aturan main yang jelas untuk pengelolaan pasca serah terima RHL, termasuk dukungan kebijakan anggaran jangka panjang yang berkelanjutan.

Ketiga, dimensi perilaku aktor dalam pelaksanaan RHL melibatkan berbagai pihak, antara lain DLHK NTB, BPDASHL Dodokan Moyosari, KPH Rinjani Timur, pihak swasta yaitu CV. SZ sebagai kontraktor pelaksana, akademisi, serta masyarakat. Masing-masing aktor memiliki peran yang dijalankan sesuai dengan aturan main yang berlaku dan menunjukkan perilaku yang berbeda dalam memaknai serta mengelola sumber daya RHL. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peran masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan monitoring evaluasi masih perlu ditingkatkan. Penguatan peran masyarakat lokal menjadi penting tidak hanya untuk efektivitas program, tetapi juga sebagai strategi membangun kemandirian, rasa memiliki, serta motivasi yang kuat dalam menjaga dan memelihara hasil rehabilitasi secara berkelanjutan.

Keempat, kinerja kelembagaan RHL menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara dua skema pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara serta laporan berita acara penilaian lapangan, tingkat keberhasilan kegiatan RHL melalui skema swakelola mencapai 87,88%, sedangkan skema kontraktual 77%. Kinerja kelembagaan dinilai lebih baik pada skema swakelola yang dikelola oleh KPH Rinjani Timur dari pada secara kontraktual. Hal ini ditunjukkan melalui pengawasan yang lebih ketat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada skema kontraktual yang dilaksanakan oleh CV. SZ, ditemukan lebih banyak kendala, seperti lemahnya pengawasan, tidak adanya penegakan sanksi yang tegas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan. Sementara wawancara terhadap responden menyatakan keberhasilan swakelola yaitu 72% dan 4% kontraktual (survei).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan RHL di lokasi penelitian masih belum optimal. Kelembagaan yang ada belum mampu secara efektif menjamin keberlanjutan hasil rehabilitasi dalam jangka panjang. Diperlukan penguatan aspek koordinasi, penegakan aturan, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan program RHL.

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan, Kelembagaan, KPH Rinjani Timur, RHL, SSPK (Struktur-Sumber daya-Perilaku aktor-Kinerja)

SUMMARY

RIZKI SUKARMAN S. Title of Thesis. Supervised by IIN ICHWANDI, and BRAMASTO NUGROHO.

The Rinjani Timur Forest Management Unit (KPH) in West Nusa Tenggara (NTB) is currently facing severe forest degradation and damage, primarily due to and conversion into agricultural areas and illegal logging activities. In response, the government is implementing Forest and Land Rehabilitation (RHL) programs to restore the ecosystem's function and condition. However, the implementation is confronted with various institutional challenges. Institutions serve as frameworks that govern relationships among actors, define roles and responsibilities, and shape decision-making mechanisms at the local level. The concept of institutions encompasses not only formal structures such as government agencies, but also rules of the game, social norms, and local practices. The success of RHL greatly depends on effective inter-institutional coordination, both vertically (between central and local governments) and horizontally (among local institutions), as well as active community participation as implementers and beneficiaries. This study aims to: (1) identify physical characteristics; (2) analyze the institutional structure; (3) examine actor behavior; and (4) evaluate institutional performance in RHL.

This research focuses on two villages that implemented Forest and Land Rehabilitation (RHL) in 2021: Gunung Malang Village and Padak Guar Village. The RHL activities were carried out under two schemes: a self-managed (swakelola) scheme covering 25 hectares in Gunung Malang Village, and a contractual scheme implemented by CV. SZ covering 50 hectares each in Gunung Malang and Padak Guar Villages. This study adopts the SSPK analytical framework (Institutional Structure, Resource Characteristics, Actor Behavior, and Institutional Performance) as developed by Nugroho (2016). Within this framework, institutional performance is shaped by the interaction of three core components: institutional structure, resource characteristics, and actor behavior. These three elements form institutional dynamics that ultimately influence the success of the RHL program implementation.

The first finding relates to the characteristics of the resource. The RHL area is characterized by dry, rocky land with limited water access. The area is actively used by local communities and managed through an agroforestry approach. In terms of provision and consumption characteristics, the RHL area is categorized as a common pool resource (CPR). CPRs have two key features: they are non-excludable (it is difficult to prevent others from accessing the resource) and subtractable (use by one party reduces availability for others). These characteristics pose unique management challenges, as they require institutional mechanisms capable of regulating access, usage, and maintenance of the resource in a collective and sustainable manner.

Second, the institutional structure consists of two main forms: formal institutions and informal institutions. Formal institutions include regulations and standard operating procedures (SOPs), while informal institutions refer to social norms, values, and local practices that prevail within the community. This study found differences in the effectiveness of the two RHL implementation schemes. The self-managed scheme carried out by the East Rinjani FMU (KPH Rinjani Timur) demonstrated better outcomes compared to the contractual scheme implemented by CV. SZ. This difference is particularly evident in aspects of field monitoring and the level of community involvement in rehabilitation activities.

A synthesis of the findings related to institutional structure highlights several key points: (1) There is ambiguity in certain roles and authorities, leading to overlapping responsibilities that need to be clearly defined; (2) Integrity values such as honesty must be instilled and enforced based on agreed-upon rules of the game; (3) The minimum achievement target of 75% should not merely serve as an administrative indicator, but must reflect substantive quality outcomes; (4) A lack of transparency regarding the progress of RHL implementation poses a serious obstacle to fostering participation and accountability; and (5) A shared commitment and clearly defined rules are needed for post-handover management of RHL, including sustained policy and budgetary support over the long term.

Third, the actor behavior dimension in the implementation of RHL involves multiple stakeholders, including the NTB Provincial Forestry and Environment Agency (DLHK NTB), the Watershed Management Agency (BPDASHL) Dodokan Moyosari, the East Rinjani Forest Management Unit (KPH Rinjani Timur), the private sector (CV. SZ as the implementing contractor), academics, and local communities. Each actor plays a role based on the prevailing rules and exhibits different behaviors in interpreting and managing RHL resources. However, this study finds that community involvement across various stages planning, implementation, monitoring, and evaluation still needs to be strengthened. Empowering the role of local communities is crucial not only for program effectiveness but also as a strategy to build self-reliance, a sense of ownership, and strong motivation to maintain and sustain rehabilitation outcomes over the long term.

Fourth, the institutional performance of the RHL program shows a significant disparity between the two implementation schemes. Based on interview results and official field assessment reports, the success rate of RHL activities under the self-managed scheme reached 87.88%, while the contractual scheme achieved 77%. Institutional performance was found to be stronger under the self-managed scheme led by the East Rinjani FMU (KPH Rinjani Timur), as evidenced by stricter monitoring and higher levels of community participation. In contrast, the contractual scheme implemented by CV. SZ encountered more obstacles, including weak oversight, lack of strict sanction enforcement, and minimal community involvement in implementation processes. Meanwhile, interviews with respondents reported a perceived success rate of 72% for the self-managed scheme and only 4% for the contractual scheme (survey-based perception).

Thus, it can be concluded that the institutional performance in the implementation of RHL at the study sites remains suboptimal. Existing institutions have not yet been effective in ensuring the long-term sustainability of rehabilitation outcomes. Strengthening coordination, rule enforcement, and community participation is essential to develop adaptive, accountable, and sustainable institutional arrangements that can support the success of the RHL program.

Keywords: Land Use Conversion, Institutions, East Rinjani FMU (KPH Rinjani Timur), Forest and Land Rehabilitation (FLR), SSPK (Structure–Resources–Actor Behavior–Performance).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

KELEMBAGAAN PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KPH RINJANI TMUR

RIZKI SUKARMAN S

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister pada
Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Tesis:
1 Dr. Ir. Bahruni, M.S



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University



Judul Tesis : Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH
Rinjani Timur

Nama : Rizki Sukarman S
NIM : E1501221003

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc.F.Trop

Pembimbing 2:
Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.S

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Prof. Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.Sc
NIP. 19611126 198601 1 001

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.S
NIP. 19650122 198903 1 002

Tanggal Ujian: 25 Juli 2025

Tanggal Lulus: 05 AUG 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Desember 2023 ini ialah benar dengan judul “Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH Rinjani Timur”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Para pembimbing Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc.F.Trop selaku ketua komisi pembimbing dan Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.S selaku anggota komisi pembimbing, yang telah membimbing, banyak memberi saran dan mendorong penulis dalam penyelesaian studi magister ini.
2. Para civitas akademika lingkup Fakultas Kehutanan dan Lingkungan khususnya Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan yang banyak memberikan ilmu, fasilitas, dan dukungan administratif selama studi.
3. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua yaitu Bapak Muhammad Sawaka, (Almh) Ibu Aminah Koko dan Ibu Astini Arsih serta kakak & adik-adik penulis atas kasih dan sayangnya yang terus mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Seluruh elemen yang telah membantu dalam penyelesaian tesis dan studi.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, 31 Juli 2025

Rizki Sukarman S



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Kerangka Berpikir	7
II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10
2.2 Struktur Kelembagaan	10
2.3 Karakteristik Sumberdaya	11
2.4 Konsep Kelembagaan	13
2.5 Perilaku Aktor	15
2.6 Kinerja Kelembagaan	17
III METODE	18
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	18
3.2 Alat dan Bahan	19
3.3 Metode Penelitian	19
3.4 Pengumpulan Data	19
3.5 Analisis data	20
III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
4.1 KPH Rinjani Timur	26
4.2 Desa Gunung Malang	27
4.3 Desa Padak Guar	28
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
5.1 Karakteristik Kondisi Fisik Kawasan	31
5.2 Struktur Kelembagaan RHL	32
5.3 Pemangku Kepentingan	44
5.4 Kinerja Kelembagaan RHL	52
V KESIMPULAN DAN SARAN	62
6.1 Kesimpulan	62
6.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

1	Luas rehabilitasi hutan dan lahan di Lombok Timur	5
2	Karakteristik penyediaan dan konsumsi barang dan jasa (Nugroho 2013)	13
3	Ringkasan metode pengumpulan data	20
4	Rekapitulasi hasil pengukuran luas tanaman rehabilitasi hutan dan lahan	23
5	Variabel pengukuran kinerja kelembagaan	24
6	pekerjaan masyarakat Desa Gunung Malang	28
7	pekerjaan masyarakat Desa Padak Guar	29
8	analisis <i>rules in use</i> kondisi aktual RHL di KPH Rinjani Timur	40
9	ringkasan sintesis dan implikasi	41
10	<i>Stakeholder</i> dalam pelaksanaan RHL	44
11	Peran aktor pada pelaksanaan RHL	46
12	Peran masing-masing aktor dalam RHL	46
13	Perilaku <i>stakeholder</i> RHL swakelola dan kontraktual	51
14	Tingkat keberhasilan RHL tiap tahap berdasarkan skema swakelola dan kontraktual	53
15	Perbandingan target dan realisasi pelaksanaan RHL secara swakelola dan kontraktual	53

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Berpikir Penelitian	9
2	Peta Lokasi penelitian pada dua Desa (Gunung Malang dan Padak Guar)	18
3	Kerangka kerja Struktur Kelembagaan - Karakteristik Sumberdaya – Perilaku Aktor - Kinerja (SSPK)	21
4	Peta Desa Gunung Malang dan Padak Guar	27

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Hasil Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>)	72
2	Lampiran 2 Tutupan Lahan tahun 2021 dan 2025 sebagai perbandingan kondisi lahan areal RHL	81
3	Lampiran 3 Foto Kondisi Lapangan	87
4	Lampiran 4 Peta Kawasan Hutan Desa Gunung Malang dan Padak Guar	90
5	Lampiran 5 Dokumentasi wawancara Bersama masyarakat	91